

# PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH

Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura

Muhammad Rizky Pratama,SE<sup>1</sup>

Bill Pangayow,SE.,M.Si.,Ak<sup>2</sup>

## Abstract

*This study aimed to analyze the effect of an inventory of assets, legal, audit, asset valuation, as well as the supervision and control of the asset, the asset management optimization area. Studies in Jayapura city government.*

*This study was conducted in 29 government institutions in the city of Jayapura. Collecting data in this study is the use of questionnaires and interviews with civil servants (PNS) working in the regional work units (SKPD) Jayapura city government. The sampling technique used in this research is purposive sampling number of research samples taken as many as 66 respondents. data analysis techniques using multiple linear regression. And using SPSS 16.00.*

*Based on the analysis using test equipment Linear Regression indicates that the asset inventory is not proven effect on the optimization of the asset management area, which means do not fit the hypothesis, individually legal audit proved positive and significant impact on the optimization of the asset management area, individually, individually asset valuation proved no effect on the optimization of local asset management, supervision and control of assets proved to be positively and significantly to the optimization of the asset management area. While the results of the joint analysis - together / simultaneously showed that all four variables, namely an inventory of assets, legal audit, asset valuation, as well as the supervision and control of assets proved to have a significant effect / positively to optimizing the management of local assets.*

**Keyword:** *an inventory of assets, legal audit, asset valuation, monitoring and control of assets, and asset optimization.*

## PENDAHULUAN

Manajemen Aset merupakan salah satu topik yang menarik dibicarakan khususnya di Indonesia. Setiap organisasi swasta maupun organisasi pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun publik. Peran penting manajemen aset, baik di sektor swasta maupun publik, semakin diakui dan tidak kalah dengan peran manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia.

*Chartered Institute of Management Accountant* (1994) menyatakan, akuntansi manajemen adalah Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan aset. Untuk dapat mengelola aset dengan baik, diharapkan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dengan baik seperti, ekonomi, akuntansi, teknik, komputer dan manajemen. Disiplin-disiplin ilmu ini kemudian diracik sedemikian rupa sehingga menjadi satu ilmu yang dikenal manajemen aset.

Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta

<sup>1</sup> Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

mampu mendorong tercapainya tujuan. Secara umum, siklus pengelolaan aset adalah tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun (2007) siklus tersebut mulai dari: (1) Perencanaan; meliputi penentuan kebutuhan dan penganggarnya, (2) Pengadaan; meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya, (3) Penyimpanan dan penyaluran, (4) Pemeliharaan, (5) Penatausahaan, (6) Penggunaan, (7) Pemanfaatan, (8) Pengamanan, (9) Penilaian, (10) Penghapusan, (11) Pemindahtanganan, (12) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, (13) Pembiayaan, (14) Tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Widayanti (2010) meneliti mengenai pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap pemerintah kabupaten (studi kasus di Kabupaten Sragen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) secara signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset. Sedangkan variabel independent lainnya yaitu legal audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Jusmin (2013) meneliti pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) secara signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan variabel independent lainnya yaitu legal audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aronggear (2015), meneliti tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (studi di Kabupaten Pegunungan Bintang), Terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial variabel pemeliharaan aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan). Tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel pengamanan aset, variabel pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) secara signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi, penilaian aset. Sedangkan variabel independent lainnya yaitu pemeliharaan, pengawasan, serta pengawasan dan pengendalian menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Pemerintah Kota Jayapura sendiri masih memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan asetnya. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Jayapura pada tahun 2014, terdapat koreksi BPK RI diantaranya koreksi kurang aset kendaraan dinas yang telah dihapuskan namun masih tercatat dalam Aset Lain-Lain, dan reklasifikasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin rusak perolehan 2012-2014 yang masih tercatat sebagai Aset Tetap.

Atas dasar beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lebih khususnya, Pemerintah Kota Jayapura juga memiliki Perda sebagai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 tahun 2010. Ditambah Pemerintah Kota Jayapura juga telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya yaitu Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA). Semula LKPD disusun dengan manual dengan menggunakan program excel kemudian dikembangkan lagi menggunakan sistem terintegrasi yaitu SIMDA, sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini.

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam Pemerintah Daerah, namun belum banyak Pemerintah Daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset. Karena pada dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik.

Tujuan manajemen aset kedepannya diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Maka pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal ini adalah aset tetap. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian, dimana jika dilaksanakan dengan baik dan akurat maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisien serta dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Perbedaan hasil penelitian diatas serta fenomena yang terjadi di Kota Jayapura mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset Pemerintah Kota Jayapura. penelitian ini mereplikasi penelitian yang pernah dilakukan oleh Jusmin (2013). Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, populasi, serta memperluas sampel penelitian dengan menggunakan seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Jayapura.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset dengan judul **“Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura”**.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inventarisasi aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Jayapura.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh legal audit terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Jayapura.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penilaian aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Jayapura.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengawasan dan pengendalian aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Jayapura.

5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Jayapura.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan wawasan serta pengembangan ilmu akuntansi untuk kalangan mahasiswa dan akademis, khususnya manajemen aset pemerintah daerah.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi pemerintah Kota Jayapura dalam rangka menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau menaikkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetapnya.
3. Dapat menambah informasi sebagai tambahan referensi, serta sumber penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan manajemen aset pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORITIS

### 1. Optimalisasi Aset

Aliasuddin (2002), menyatakan bahwa optimalitas adalah salah satu usaha yang ingin dicapai oleh setiap unit bisnis. Ada dua segi optimalitas yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran. Produksi maksimum tidak menjamin keuntungan maksimum. Untuk itu, produksi optimal lebih baik daripada produksi maksimal karena produksi optimal menjamin keuntungan maksimal.

Boediono (1999) menyatakan bahwa hasil akhir dari model matematika berkaitan erat dengan beberapa variabel, kendala, dan fungsi tujuan, solusi dari model yang kemudian akan menghasilkan sebuah nilai dari beberapa variabel keputusan yang optimum (maksimasi dan minimasi) menunjukkan nilai fungsi tujuan yang memuaskan seluruh kendala. Solusi tersebut sering diistilahkan dengan solusi kelayakan optimum (*optimum feasible solution*); lebih lanjut dijelaskan bahwa *feasible solution* adalah suatu yang memenuhi seluruh kendala (*constraints*) yang ada dalam persoalan tersebut, istilah *optimum solution* adalah *feasible solution* yang memberikan nilai “terbaik” bagi fungsi tujuan. Terbaik diartikan sebagai nilai terbesar apabila tujuannya maksimisasi, dan diartikan sebagai nilai terkecil apabila fungsi tujuannya minimasi. Maksimalisasi adalah usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan total penerimaan atau total keuntungan pada kendala sumber daya yang terbatas Husaini dalam Jusmin (2013). Jadi maksimalisasi aset adalah usaha organisasi untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan nilai, untuk pencapaian tersebut dibutuhkan penerapan manajemen aset secara konsisten.

### 2. Inventarisasi aset

Menurut Siregar (2004) tahapan manajemen aset daerah sebagai berikut. Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi /labeling, pengelompokan dan pembukuan / administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh

pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi. Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

### **3. Legal Audit**

Siregar (2004) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

### **4. Penilaian Aset**

Penilaian adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Berdasarkan Perpmendagri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

### **5. Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Inventarisasi Aset**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Semakin besar peningkatan inventarisasi aset daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada optimalisasi aset tetap daerah. (Widayanti, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Antoh (2012), melakukan penelitian terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Panai. Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inventarisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.**

### **2. Legal Audit**

Selain proses inventarisasi, maka hal penting selanjutnya dalam optimalisasi aset yang perlu dilakukan adalah legal audit. Berdasarkan Perppmendagri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalitas aset rumah sakit jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara. Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legal audit aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalitas

aset. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Legal Audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.**

### 3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu proses indikasi, melalui suatu pengetahuan atau metode tertentu terhadap suatu objek untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Penilaian aset perlu dibedakan dengan penilaian pada umumnya. Penilaian aset dilakukan khusus atas suatu aset (harta/benda) dari suatu entitas kepemilikan. Penilaian aset (*appraisal/valuation*) harus dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu aset tertentu. Mengingat konsep aset yang dinilai adalah dalam konsep hukum yang mempunyai nilai ekonomis, maka indikasi nilai yang dihasilkan dari suatu penilaian dituangkan dalam satuan moneter. Penilaian merupakan ilmu praktis yang bersifat multi disiplin, karenanya kaitan dan dukungan ilmu pengetahuan lainnya sangat penting untuk dipahami oleh para penilai.

Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2010), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap Pemerintah Kabupaten (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, identifikasi dan legal audit, serta penilaian aset. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian aset terbukti berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sragen. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Penilaian Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.**

### 4. Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengendalian adalah segala usaha atau segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku. Pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Unit/Satuan Kerja Bersangkutan di mana barang-barang dimaksud berada. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang berusaha untuk mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmin (2013), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Baubau. Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Baubau. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

#### **H<sub>4</sub>: Pengawasan dan Pengendalian Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.**

### **5. Optimalisasi Aset**

Menurut (Siregar, 2004) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu, inventarisasi, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Jika kelima tahapan manajemen ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aronggear (2015), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (studi di Kabupaten Pegunungan Bintang), yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel inventarisasi aset, penilaian aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, serta pengawasan dan pengendalian secara serempak (bersama-sama) terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

#### **H<sub>5</sub>: Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian Aset, serta Pengawasan dan Pengendalian Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kota Jayapura.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono dalam Aronggear (2015). Populasi adalah keseluruhan subyek yang hendak diteliti Arikunto dalam Aronggear (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu memberikan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian (Jusmin, 2013). Adapun kriteria-kriteria yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Staf yang memiliki pengetahuan tentang manajemen aset pada SKPD ditempati bekerja, serta bertanggung jawab langsung atau pihak yang berwenang dalam mengurus barang.
2. Responden merupakan staf pengelola barang yang telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (tahun) sebagai staf pada SKPD tersebut.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang bekerja pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui pembagian kuesioner di lapangan atau tempat penelitian dan wawancara secara langsung dengan responden. Data



sekunder merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara (Diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu data yang di kumpul melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*) serta wawancara langsung kepada para pegawai. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang digunakan pada penelitian Jusmin (2013). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikannya kepada pegawai yang bekerja serta sesuai dengan kriteria pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura.

### **Uji Kualitas Instrumen**

#### **1. Uji Validitas**

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*) dan tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti akuntansi, manajemen, psikologi, dan sosiologi, variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai sebuah variabel *latent* atau *un-observeb* atau konstruk, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator yang diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach apla* lebih besar dari 0,60 (Prayitno, 2012).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Statistik Deskriptif**

Hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan merupakan hasil pengukuran deskriptif masing-masing variabel dari 95 data pengamatan, menunjukkan rentang skala teoritis dari nilai *minimum* dan *maximum*, kemudian hasil nilai rata-rata (*mean*) serta nilai dari standar deviasinya. Penjelasan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Inventarisasi Aset**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 19 dan nilai *maximum* sebesar 25. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 22,11 dan standar deviasinya sebesar 2,076. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa proses inventarisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menjalankan proses inventarisasi aset yang cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai *maximum*-nya.

## 2. Legal Audit

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 16 dan nilai *maximum* sebesar 25. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 21,21 dan standar deviasinya sebesar 2,509. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa proses legal audit di Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menjalankan proses legal audit yang termasuk kategori cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai *maximum*-nya.

## 3. Penilaian Aset

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 16 dan nilai *maximum* sebesar 25. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 21,36 dan standar deviasinya sebesar 2,435. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa proses penilaian aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menjalankan proses penilaian aset termasuk kategori yang cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai *maximum*-nya.

## 4. Pengawasan dan Pengendalian Aset

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 12 dan nilai *maximum* sebesar 20. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 16,70 dan standar deviasinya sebesar 2,090. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan dan pengendalian aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menjalankan proses pengawasan dan pengendalian aset termasuk kategori yang cukup tinggi, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai *maximum*-nya.

## 5. Optimalisasi Aset

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 9 dan nilai *maximum* sebesar 25. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 17,53 dan standar deviasinya sebesar 4,361. Berdasarkan hasil jawaban para responden dan hasil deskriptif, dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan dan pengendalian aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura menjalankan proses optimalisasi aset termasuk kategori yang cukup rendah, dimana pengukuran ini berdasarkan nilai *mean* yang lebih mendekati kepada nilai *minimum*-nya.

## Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Data dinyatakan valid jika nilai  $r$  – hitung yang merupakan nilai dari *Correlated Item – Total Correlation* lebih besar dari  $r$  – tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing item variabel semuanya di atas  $r$  tabel. Untuk instrumen inventarisasi aset diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,691, untuk instrumen legal audit nilai terkecil 0,676, untuk instrumen penilaian aset dengan nilai terkecil sebesar 0,650, untuk instrumen

pengawasan dan pengendalian aset dengan nilai terkecil sebesar 0,707, dan untuk instrumen optimalisasi aset dengan nilai terkecil sebesar 0,798.

### Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas dimaksud untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai cronbach's alpha dari masing-masing instrumen menyatakan lebih besar dari 0,6 (ghozali,2006).

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yaitu untuk instrumen inventarisasi aset 0,790, untuk instrument legal audit 0,805, untuk instrumen penilaian audit 0,765, untuk instrumen pengawasan dan pengendalian aset 0,752, dan untuk optimalisasi aset sebesar 0,903. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,587 dengan signifikan 0,880. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas  $> 0,05$ .

#### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value di atas 0,10 dan  $VIF < 10$  maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan tolerance value berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

#### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil uji penelitian, heterokedastisitas dapat dilihat titik – titik pada grafik *scatterplot* tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang

terjadi adalah terlihat pola titik– titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

## Hasil Penelitian

### 1. Uji Koefisien Determinan

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh keempat variabel independen yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura adalah sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar keempat variabel independen dalam penelitian ini. Angka tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.15 dimana *adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.306 atau 30,6%.

### 2. Uji Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah optimalisasi aset. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

#### a. Inventarisasi Aset (IA) berpengaruh negatif terhadap Optimalisasi Aset.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel inventarisasi aset ( $X_1$ ) terhadap optimalisasi aset (Y) pada pemerintah kota jayapura memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $-0.224 < 1.66827$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,824 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel inventarisasi aset ( $X_1$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini ditolak.

#### b. Legal Audit (LA) berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Aset.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel legal audit ( $X_2$ ) terhadap optimalisasi aset (Y) pada pemerintah kota jayapura memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $2.018 > 1.66827$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu  $0,048 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel legal audit ( $X_2$ ) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) pada penelitian ini diterima.

#### c. Penilaian Aset (PA) berpengaruh negatif terhadap Optimalisasi Aset.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel penilaian aset ( $X_3$ ) terhadap optimalisasi aset (Y) pada pemerintah kota jayapura memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $0.648 < 1.66827$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,519 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel penilaian aset ( $X_3$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini ditolak.

#### d. Pengawasan dan Pengendalian Aset (PP) berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Aset.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel pengawasan dan pengendalian aset ( $X_4$ ) terhadap optimalisasi aset (Y) pada pemerintah kota jayapura memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $2.554 > 1.66827$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu  $0,013 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel pengawasan dan pengendalian aset ( $X_4$ ) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) pada penelitian ini diterima.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa variabel inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap otimalisasi aset di Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan inventarisasi aset tidak menjamin optimalisasi pengelolaan aset disektor Pemerintah Daerah. Inventarisasi aset dibuat untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, akan tetapi ketidakkonsistenan hasil ini dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap inventarisasi aset, yang mengakibatkan pelaksanaan inventarisasi aset menjadi tidak tertib dan tidak tertata dengan baik.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Jayapura pada tahun 2014, terdapat koreksi BPK RI diantaranya koreksi kurang aset kendaraan dinas yang telah dihapuskan namun masih tercatat dalam Aset Lain-Lain, dan reklasifikasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin rusak perolehan 2012-2014 yang masih tercatat sebagai Aset Tetap. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pencataan aset milik Pemerintah Kota Jayapura masih kurang. Terbukti masih terdapat aset – aset yang harusnya telah dihapus, namun masih tercatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah. Tidak tertibnya pelaksanaan inventarisasi aset didukung juga dari hasil wawancara dengan bapak wely selaku kabid aset di BPKAD yang mengatakan:

*“Saat ini Pemerintah Daerah Kota Jayapura sedang melakukan perubahan – perubahan yang diharapkan dengan perubahan tersebut dapat memperbaiki penatausahaan aset di Pemerintah Kota Jayapura”*

Adapun perubahan – perubahan yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura yaitu dengan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Diharapkan dengan diterapkannya aplikasi SIMDA tersebut dapat memudahkan para pegawai dalam menginventarisir, mencatat, dan menjaga seluruh aset yang ada di Pemerintah Kota Jayapura agar pencatat aset menjadi tertib, terurus, dan tertata dengan rapi. Selain itu, setiap tahunnya Pemerintah Kota Jayapura juga mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai khususnya dalam hal inventarisasi aset.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Syukri (2014). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa inventarisasi aset terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang juga sama melihat inventarisasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset daerah, yang menyebutkan kemungkinan inventarisasi aset tidak berpengaruh disebabkan oleh inventarisasi yang kurang tertib dan tidak terurus dengan baik sehingga tidak dapat menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

### 2. Pengaruh Legal Audit terhadap optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa variabel legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan legal audit yang baik dapat menjamin optimalisasi pengelolaan aset disektor Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan sistem yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan aset.

Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain – lain. Terkait dengan penguasaan Pemerintah Kota Jayapura sendiri pada tahun lalu telah melaksanakan sensus barang milik daerah. Dengan adanya sensus tersebut diharapkan dapat mengetahui aset – aset apa saja yang merupakan milik Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah kota juga tengah berupaya untuk membuat sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap aset dalam hal ini tanah, karena salah satu permasalahan khususnya di Papua adalah terkait dengan budaya yang masih sangat kental. Masih terdapat banyak tanah yang diakui sebagai tanah adat, namun Pemerintah Kota Jayapura tetap berusaha melakukan pelepasan tanah adat tersebut secara bertahap, sehingga seluruh aset milik Pemerintah Kota Jayapura menjadi jelas. Dalam hasil wawancara bersama bapak timo sebagai kassubid analisis pengadaan dan distribusi, mengatakan :

*“Untuk mengetahui penggunaan aset khususnya kendaraan yaitu dengan pembuatan sejenis STNK yang digunakan untuk kendaraan milik Pemrintah Kota Jayapura”*

Pembuatan sejenis STNK dimaksudkan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengetahui aset mana saja yang dimiliki oleh Pemerintah, selain itu juga untuk mengawasi aset khususnya kendaraan. Supaya jelas siapa yang memakai, dari instansi mana dan berada dimana aset tersebut. Dengan dilakukannya langkah – langkah seperti itu akan menghindarkan kerugian daerah karena kehilangan yang merupakan aset – aset daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Widayanti (2010). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa legal audit terbukti tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah (tanah dan bangunan). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Nasution (2013). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa legal audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi legal audit yang dilakukan maka menyebabkan peningkatan optimalisasi aset.

### **3. Pengaruh Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa variabel penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan penilaian aset tidak menjamin optimalisasi pengelolaan aset disektor Pemerintah Daerah. Ketidakkonsistenan hasil ini dikarenakan Pemerintah Kota Jayapura masih menggunakan pihak ketiga dalam hal penilaian, dan belum memiliki konsultan penilai yang independen (bersertifikat).

Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilai yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menentukan harga bagi aset yang ingin dijual. Dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura belum memiliki lembaga independen (bersertifikat), dalam wawancara dengan ibu nur sebagai kasubid analisa kebutuhan dan inventarisasi, mengatakan:

*“Untuk saat ini kami tidak memiliki penilai yang Independen (bersertifikat), dan masih menggunakan pihak ketiga”*

Dapat dilihat bahwa proses penilaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura masih belum maksimal, karena masih menggunakan jasa pihak ketiga, bukan lembaga independen (bersertifikat). Padahal penilaian aset sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam optimalisasi aset, karena penilaian aset bertujuan untuk mengetahui nilai kekayaan yang terkandung yang dapat dimanfaatkan dalam aset tersebut dan sebagai penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Hayati (2012). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penilaian aset terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen aset. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antoh (2012) yang juga sama melihat penilaian aset tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan).

#### **4. Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa variabel pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengawasan dan pengendalian aset yang baik dapat menjamin tingkat optimalisasi pengelolaan aset disektor Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan pemberian identitas untuk aset – aset milik Pemerintah yang disebut nomor registrasi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada Pemerintah Daerah saat ini. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Jayapura telah meningkatkan salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset menjadi termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Dalam hasil wawancara dengan bapak simon, beliau mengatakan:

*” Untuk pengawasan dan pengendalian aset yang dilakukan saat ini, salah satunya seperti pencatatan dari setiap SKPD saat melakukan belanja modal atau belanja barang.”*

Bagi setiap SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, diwajibkan untuk mencatat semua belanja modal atau belanja barang yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Selanjutnya dari masing – masing SKPD akan menginput hasil belanja barang atau modal ke aplikasi SIMDA agar semua bisa tertata dengan rapi dan jelas ketika dilaporkan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Aronggear (2015). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset terbukti tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap pemanfaatan aset tetap. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fazatin (2013) yang juga sama melihat pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset aset tetap, yang menyebutkan semakin tinggi tingkat pengawasan dan pengendalian aset maka semakin baik tingkat optimalisasi aset tetap.

#### **5. Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, serta Pengawasan dan Pengendalian aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.**

Berdasarkan hasil pada analisis sebelumnya, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jusmin (2013) sebelumnya dan didukung oleh pengertian manajemen aset dari para

ahli. Ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset – aset yang dimiliki yaitu dengan inventarisasi, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian serta optimalisasi aset. Jika kelima tahapan ini dapat dijalankan dengan baik maka akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel dan transparan.

Hasil dari pengujian menunjukkan terdapat pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dapat dilihat dari probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel inventarisasi aset ( $X_1$ ), legal audit ( $X_2$ ), penilaian aset ( $X_3$ ), serta pengawasan dan pengendalian aset ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- b. Variabel legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- c. Variabel penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- d. Variabel pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kota Jayapura.
- e. Variabel inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempertimbangkan variabel – variabel yang lebih berpotensi mempengaruhi optimalisasi aset yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti pengamanan aset dan identifikasi sehingga mungkin akan lebih bisa menjelaskan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi aset.
2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian yang lebih luas misalkan di beberapa tempat/kota bahkan provinsi dalam cakupan wilayah yang lebih luas.
3. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk menambah tenaga teknis yang berkompeten untuk melakukan inventarisasi aset – aset daerah di Kota Jayapura, serta perlu adanya kerja sama dengan lembaga independen (bersertifikat) yang handal untuk melakukan penilaian aset – aset daerah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adhi. (2016). Pengertian Penilaian Aset. <https://penilaianaset.com/pengertian-penilaian/>.
- Afandi, M. N., & Khairani. (2015). Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai. 393-414.
- Alliasuddin. (2002). Produksi Optimal dan RTS: Industri Besar dan Sedang di Provinsi NAD. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2002*, (pp. 1-7).
- Amanda, A. S. (2015). Evaluasi Sistem Manajemen Aset Tetap Pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. 15.
- Antoh, A. E. (2012). Manajemen Aset Dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aronggear, C. J. (2015). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) (Studi Di Kabupaten Pegunungan Bintang).
- Atikah, S., AM, S., & Lestari, A. H. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Mataram). *Artikel Ekonomi*. Mataram: Universitas Mataram.
- Azhari, L., & Roos, A. (2010). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, Volume 17, Nomor 3, Desember 2010*.
- Boediono. (1999). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Danang, S. (2011). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Caps Publishing.
- Fazatin, S. (2013). Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Jepara. *Artikel* (p. 15). Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadinata, A. (2011). *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Hayati, M., Ramayani, C., & Areva, D. (2012). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat. *Artikel* (p. 10). Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) .
- Hidayat, S. (2015). Optimalisasi Penelolaan (Manajemen) Aset Daerah. 8.
- Jusmin. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap.
- Nasution, E. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Daerah.
- Nyemas Hasfi, d. (2015). Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Skripsi* (p. 17). Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

- Pemerintah Kota Jayapura. (2010). Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2010*. Jayapura: Pemerintah Kota Jayapura.
- Phahlevi, & Reza, M. (2002). Manajemen Aset Real Estate Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. *Tesis*.
- Ramadhani, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamatan Aset Daerah. *Skripsi*. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara. Jakarta: sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara. Jakarta: sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014*. Jakarta.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P. D. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, P. M. (2015). Manajemen Aset (Analisis Peralihan Fungsi Bangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung).
- Sutaryo. (2015). Manajemen Aset Daerah. (p. 9). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syahroza, A. (2013). Corporate Governance sejarah dan perkembangan, teori model, dan sistim Governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia .
- Syukri, S., Haliah, & Kartini. (2014). Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. *Artikel* (p. 9). Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Wahyuningrum, E., Larasati, S. E., & Djumiarti, T. (2015). Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Salatiga. *Artikel* (p. 11). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widayanti, E. (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah.

Wikipedia. (2012, Agustus 23). Akuntansi Manajemen Publik. [https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi\\_Manajemen\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Manajemen_Publik).

yanuarius, & pakiding. (2006). Hubungan Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul). *Tesis*.